



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

KAJIAN TERHADAP FENOMENA POLITISASI AGAMA DALAM PERPOLITIKAN
DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF *LIBIDO DOMINANDI* AGUSTINUS

TESIS

Diajukan Kepada
Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Teologi

Oleh
Theofilus Soleman
NIM 2124129

Jakarta
2026

LEMBAR PENGESAHAN

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

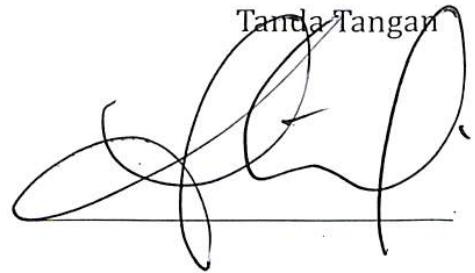
JAKARTA

Ketua Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung mengesahkan Tesis berjudul **KAJIAN TERHADAP FENOMENA POLITISASI AGAMA DALAM PERPOLITIKAN DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF *LIBIDO DOMINANDI* AGUSTINUS**, yang telah diuji dan dinyatakan lulus oleh Tim Dosen pada tanggal 4 Mei 2026.

Dosen Pembimbing

Fandy Handoko Tanujaya, B.Bus., Ph.D.
NIDN 2318108202

Tanda Tangan



Dosen Penguji

Pdt. Chelcent Fuad, Ph.D
NIDN 2311048802

Tanda Tangan



Yeremia Yordani Putra, M.Th.
NIDN 2323119201



18 Mei 2026

Pdt. Casthelia Kartika, D.Th.
NIDN 2323057301

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang berjudul KAJIAN TERHADAP FENOMENA POLITISASI AGAMA DALAM PERPOLITIKAN DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF *LIBIDO DOMINANDI* AGUSTINUS, sepenuhnya adalah hasil karya tulis saya sendiri dan bebas dari plagiarisme.

Jika di kemudian hari terbukti bahwa saya telah melakukan tindakan plagiarisme dalam penulisan Tesis ini, saya akan bertanggung jawab dan siap menerima sanksi apa pun yang dijatuhkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung.

Jakarta, 4 Mei 2026



Theofilus Soleman
NIM 2124129

ABSTRAK

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

JAKARTA

- (A) Theofilus Soleman (NIM 2124129)
- (B) KAJIAN TERHADAP FENOMENA POLITISASI AGAMA DALAM PERPOLITIKAN DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF *LIBIDO DOMINANDI* AGUSTINUS
- (C) viii + 167 hlm; 2026
- (D) Program Studi Magister Teologi/Konsentrasi Teologi Sistematika
- (E) Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena politisasi agama dalam politik elektoral di Indonesia pasca Reformasi dari perspektif *libido dominandi* Augustinus. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kajian mengenai politisasi agama yang umumnya menggunakan pendekatan ilmu sosial dan politik. Pendekatan tersebut memang memberikan kontribusi penting dalam memahami gejala yang tampak di permukaan, tetapi sering kali belum menyentuh dimensi yang lebih mendasar terkait motivasi manusia. Dalam konteks ini, pemikiran Augustinus mengenai *libido dominandi* menjadi relevan dan signifikan. Penelitian ini berfokus pada konsep *libido dominandi* dalam teologi politik Augustinus, khususnya dalam kritiknya terhadap Roma. Kritik tersebut menunjukkan bahwa praktik politik Roma yang menggunakan agama demi kekuasaan dibaca sebagai manifestasi dari *libido dominandi*. Indikator-indikator tersebut kemudian digunakan sebagai alat analisis untuk menilai fenomena politisasi agama dalam politik elektoral Indonesia pasca Reformasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan politisasi agama dalam politik elektoral di Indonesia pasca Reformasi memperlihatkan indikator-indikator *libido dominandi* dalam teologi politik Augustinus. Dengan demikian, fenomena politisasi agama dalam politik elektoral di Indonesia pasca Reformasi dapat dibaca sebagai manifestasi *libido dominandi*.
- (F) BIBLIOGRAFI 58 (1957-2025)
- (G) Fandy Handoko Tanujaya, B.Bus., Ph.D. (NIDN 2318108202)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR/TABEL	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
Latar Belakang Masalah	1
Rumusan Masalah	15
Tujuan Penelitian	16
Manfaat Penelitian	16
Pembatasan Penelitian	17
Metode Penelitian	17
Sistematika Penulisan	18
BAB DUA <i>LIBIDO DOMINANDI</i> DALAM POLITIK ROMAWI MENURUT PEMBACAAN AGUSTINUS DALAM <i>DE CIVITATE DEI</i>	21
Pendahuluan	21
<i>Libido Dominandi</i> dalam Teologi Politik Agustinus	22
Antropologi Agustinus dalam Penciptaan dan Kejatuhan	24
<i>Libido Dominandi</i> sebagai Hasrat yang Muncul karena Dosa	27
Kekuasaan tanpa <i>Libido Dominandi</i> Menurut Agustinus	32
Relasi antara Agama Romawi dan Kekuasaan Politik Romawi	37
Indikator-indikator <i>Libido Dominandi</i> dalam Politik Romawi	44

Agama dipakai untuk Melegitimasi Kekuasaan dan Ekspansi Politik	46
Agama dipakai untuk Menormalisasi Ketidakadilan	55
Agama dipakai untuk Melindungi Kekuasaan dari Kritik	61
Kesimpulan	67
BAB TIGA POLITISASI AGAMA DALAM POLITIK ELEKTORAL DI INDONESIA PASCA REFORMASI	69
Pendahuluan	69
Politik Elektoral: Definisi, Prinsip, dan Keadilan Pemilu	70
Definisi Politik Elektoral	71
Politik Elektoral yang Adil dan tidak Adil	73
Politisasi Agama dan Politik Identitas dalam Politik Elektoral	77
Definisi Politisasi Agama	78
Hubungan Politik Identitas dan Politisasi Agama	83
Peran Positif Agama dalam Politik	86
Politisasi Agama sebagai Instrumen Mobilisasi Politik Elektoral	90
Politisasi Agama dalam Praktik Politik Elektoral Pasca Reformasi	94
Politik Elektoral era Orde Lama dan Orde Baru	96
Politik Elektoral era Pasca Reformasi	99
Dampak Politisasi Agama Bagi Kehidupan Sosial dan Demokrasi	111
Kesimpulan	114
BAB EMPAT FENOMENA POLITISASI AGAMA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF <i>LIBIDO DOMINANDI</i> AGUSTINUS	116
Pendahuluan	116
Relevansi Konsep <i>Libido Dominandi</i> Agustinus	117
Fenomena Politisasi Agama sebagai Manifestasi <i>Libido Dominandi</i>	119
Distorsi Kekuasaan dan Kebaikan Bersama dalam Politik Elektoral	126

Respons Gereja Terhadap Fenomena Politisasi Agama	135
Gereja Membentuk <i>Amor Dei</i> dalam Diri Jemaat	135
Gereja Mengusahakan <i>Common Good</i> dalam Masyarakat	148
Posisi Penulis terhadap Teologi Politik Agustinus	151
Kesimpulan	155
BAB LIMA KESIMPULAN	158
BIBLIOGRAFI	163

DAFTAR GAMBAR/TABEL

1. Tabel 1: Perbedaan Kekuasaan yang digerakkan oleh <i>Libido Dominandi</i> dan Kekuasaan tanpa <i>Libido Dominandi</i>	35
2. Tabel 2: Bentuk-Bentuk Tindakan Penggunaan Agama sebagai Legitimasi Kekuasaan dalam Politik Roma	52
3. Tabel 3: Bentuk-Bentuk Tindakan Penggunaan Agama sebagai Normalisasi Ketidakadilan dalam Politik Roma	59
4. Tabel 4: Bentuk-Bentuk Tindakan Penggunaan Agama sebagai Anti Kritik dalam Politik Roma	65
5. Tabel 5: Perbedaan Politik Elektoral yang Adil dan Tidak Adil	76
6. Tabel 6: Bentuk-Bentuk Tindakan Politisasi Agama sebagai Instrumen Kekuasaan	83
7. Tabel 7: Analisis Bentuk-Bentuk Tindakan Politisasi Agama dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 dalam Perspektif <i>Libido Dominandi</i> Augustinus	120
8. Tabel 8: Analisis Bentuk-Bentuk Tindakan Politisasi Agama dalam Pilkada Sulawesi Utara 2020 dalam Perspektif <i>Libido Dominandi</i> Augustinus	123
9. Tabel 9: Dampak-Dampak Politisasi Agama dalam Kehidupan Bermasyarakat	125
10. Gambar 1: Liturgi membentuk Kebiasaan dan Hasrat Manusia	138

BAB SATU

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah Indonesia, agama dan politik hampir tidak pernah berjalan sendiri-sendiri. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai Reformasi, agama selalu muncul dalam ruang publik dan ikut mempengaruhi dinamika politik bangsa. Contohnya, pada masa kemerdekaan, banyak tokoh dari berbagai agama membawa nilai-nilai keagamaan mereka ke dalam perjuangan nasional. Perjuangan tokoh-tokoh seperti Pangeran Diponegoro, Teuku Umar, dan Pattimura menunjukkan bahwa nilai-nilai keagamaan telah menjadi sumber motivasi politik jauh sebelum lahirnya organisasi modern seperti Budi Utomo.¹

Meskipun bersifat regional, perjuangan-perjuangan tersebut tetap dipengaruhi oleh inspirasi keagamaan yaitu Teuku Umar berjuang dengan dorongan nilai-nilai Islam, sedangkan Pattimura terinspirasi oleh iman Kristen.² Setelah kemerdekaan, perdebatan mengenai dasar negara semakin menegaskan kuatnya peran agama dalam politik nasional. Walaupun pada akhirnya Pancasila disepakati sebagai dasar negara, agama tetap menempati posisi yang sentral dalam kehidupan politik bangsa. Ini terlihat dari sila pertama Pancasila yang berbunyi keTuhanan

1. Benyamin Fleming Intan, *"Public religion" and the Pancasila-based state of Indonesia: an ethical and sociological analysis*, American university studies no. v. 238 (New York: Peter Lang, 2006), 32.

2. Intan, *"Public religion" and the Pancasila-based state of Indonesia*, 32.

yang maha Esa. Dalam sila ini, Indonesia memiliki prinsip satu Tuhan, secara tegas mengakui bahwa negara akan didasarkan pada keyakinan agama, dan bahwa masyarakat Indonesia percaya pada Tuhan.³

Pengalaman sejarah ini menunjukkan bahwa campur tangan agama dalam politik bukanlah hal baru. Sejak awal berdirinya negara, agama sudah menjadi bagian dari dinamika kebangsaan. Sampai hari ini pun, di tengah masyarakat Indonesia modern, agama dan politik masih hadir sebagai elemen penting dalam kehidupan bernegara.

Namun, dalam perkembangan terakhir, hubungan ini tidak selalu berdampak positif. Dalam beberapa tahun belakangan, agama sering dipakai dalam politik dengan cara yang destruktif. Fungsi agama bergeser, tidak hanya sebagai sumber nilai moral dan spiritual, tetapi juga dijadikan alat untuk mengejar kepentingan politik praktis. Hal ini ditegaskan oleh Ihsan dan Nurhayati yang menulis:

Dalam beberapa kasus, agama menjadi ladang eksploitasi politik, baik untuk kepentingan status quo kekuasaan maupun oleh kepentingan eksistensi kelompok. Eksploitasi keagamaan dalam langgam politik dapat dipastikan memakan korban baik secara vertikal (negara pada rakyat) maupun secara horizontal, yaitu dalam konteks relasi dan interaksi sosial mayoritas versus minoritas. Kondisi ini menambah daftar panjang hilangnya misi profetis agama yang rahmah yaitu penuh dengan cinta kasih.⁴

Fenomena penggunaan agama dalam kepentingan politik ini sering disebut sebagai politisasi agama. Secara sederhana, politisasi agama adalah upaya memakai simbol, identitas, atau emosi keagamaan untuk meraih dukungan politik. Hal ini ditegaskan

3. Intan, *"Public religion" and the Pancasila-based state of Indonesia*, 18.

4. A. Bakir Ihsan dan Cucu Nurhayati, *Agama, Negara, dan Masyarakat: Tokoh Agama di Tengah Politik Identitas Warga Kota*, cetakan pertama. (Jakarta: Penerbit HAJA Mandiri, 2020), 3-4.

oleh Fadli Rais yang menuliskan bahwa politisasi agama adalah upaya politisi memengaruhi masyarakat untuk mencapai tujuan politis tertentu dengan menggunakan identitas agama.⁵

Salah satu contoh paling menonjol dari politisasi agama terlihat pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Banyak pihak memandang peristiwa ini sebagai titik penting dalam sejarah politik Indonesia kontemporer. Awalnya, Pilkada tersebut hanyalah kompetisi elektoral biasa, tetapi kemudian berubah menjadi ajang mobilisasi isu keagamaan yang sangat kuat. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), gubernur petahana yang beretnis Tionghoa dan beragama Kristen, menjadi sasaran utama kampanye yang menonjolkan isu identitas. Basuki Tjahaja Purnama (BTP), Gubernur DKI Jakarta, dianggap menista Al-Qur'an ketika mengutip Surat Al Maidah ayat 51 dalam pidatonya di Kepulauan Seribu.⁶ Kontestasi politik dengan memanfaatkan identitas agama terjadi karena agama bisa menjadi basis suara.⁷

Berbagai kritik terhadap fenomena politisasi agama di Indonesia telah dikemukakan dalam beberapa penelitian. Meskipun demikian, beberapa penelitian tersebut masih didominasi oleh pendekatan ilmu politik, hukum, dan sosiologi. Secara umum, kritik-kritik tersebut berfokus pada persoalan seperti kualitas demokrasi, efektivitas regulasi, serta hubungan antara negara dan masyarakat sipil.

5. Fadli Rais, *Infeksi demokrasi: politisasi SARA dalam pemilu 2019 di Jawa Tengah*, Cetakan pertama. (Semarang: Badan Pengawas Pemilihan Umum, Provinsi Jawa Tengah : eLSA Press, 2019), 76-77.

6. Cahyo Pamungkas dan Yogi Setya, ed., *Intoleransi dan Politik Identitas Kontemporer di Indonesia* (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2020), 145.

7. Gerry Nelwan, "Identity Politics and Inter-Religious Relations: Analysing the 2020 Election in Manado City," *POLITICON : Jurnal Ilmu Politik* Vol.4 No.1 (6 Maret 2022): 1.

Misalnya dalam artikel yang ditulis oleh Pipit Widiatmaka dkk., dalam judul *Politik agama di Indonesia: politisasi agama Islam dalam kontestasi pemilihan umum*, artikel ini membahas hubungan politisasi agama dan politik. Artikel ini menunjukkan bahwa politisasi agama Islam selalu muncul dalam pemilihan umum di Indonesia dari Orde Lama, Orde Baru hingga era Reformasi.⁸ Dengan menelusuri perkembangan historis itu, artikel ini menyimpulkan bahwa politisasi agama merupakan strategi elektoral yang konsisten dan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pemilu di Indonesia.

Meskipun begitu, analisis Pipit Widiatmaka dkk. masih berada dalam kerangka ilmu politik deskriptif. Kritik yang ditawarkan hanya sampai pada pemetaan fenomena, tanpa menyentuh pertanyaan yang lebih mendasar tentang aspek antropologis dan teologis, yakni mengapa manusia terus menggunakan agama sebagai sumber legitimasi kekuasaan.

Contoh lainnya adalah artikel Ridwan dan Musafir Pababbari yang berjudul *Politisasi Agama dan Politik Identitas*. Artikel ini mengaitkan politisasi agama dengan kajian politik, hukum, dan sosiologi. Mereka menganalisis dampak politisasi agama terhadap demokrasi Indonesia, terutama dalam hal partisipasi pemilih, polarisasi sosial, dan kebijakan publik.⁹ Namun, analisis Ridwan dan Pababbari tetap berada dalam ranah empiris. Kritik yang diberikan berfokus pada dampak sosial dan politik, tanpa menyentuh pertanyaan yang lebih mendasar yaitu mengapa agama begitu

8. Pipit Widiatmaka dkk., "Politik Agama di Indonesia: Politisasi Agama Islam dalam Kontestasi Pemilihan Umum," *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* Vol. 24 No. 2 (2024): 127.

9. Ridwan dan Musafir Pababbari, "Politisasi Agama dan Politik Identitas," *LITERA Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol. 2, No. 1 (2025): 125.

mudah dimanfaatkan sebagai instrumen kekuasaan, dan apa akar antropologis-teologis dari kecenderungan tersebut.

Artikel lainnya adalah tulisan Budi Kurniawan berjudul *Politisasi Agama di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran di Indonesia dan Ancaman bagi Demokrasi*. Artikel ini menunjukkan bagaimana sentimen agama kerap dimanfaatkan untuk kepentingan politik pragmatis.¹⁰ Kurniawan menegaskan bahwa praktik tersebut berbahaya bagi perkembangan demokrasi di Indonesia, karena digunakan untuk menjatuhkan lawan politik dengan narasi keagamaan dan melemahkan kebiasaan berdiskusi secara rasional di ruang publik. Analisis Kurniawan berada dalam kerangka ilmu politik yang bersifat deskriptif-analitis.

Meskipun berbagai kajian tersebut memberikan pemahaman yang penting mengenai dimensi sosial dan politik dari politisasi agama, namun seluruh kajian tersebut masih terbatas pada analisis empiris dan struktural, belum menyingkap akar teologis dari dorongan manusia memanipulasi agama demi kekuasaan. Di sinilah teologi Kristen dapat menghadirkan analisis kritis yang melengkapi keterbatasan kajian sebelumnya. Sejumlah penelitian teologi Kristen di Indonesia memang telah membahas isu politik maupun politisasi agama, namun kajian-kajian tersebut belum sepenuhnya mampu menyingkap dimensi terdalam manusia, khususnya dorongan hasrat kuasa yang melatarbelakangi praktik politisasi agama.

10. Budi Kurniawan, "Politisasi Agama di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran di Indonesia dan Ancaman Bagi Demokrasi," *Jurnal Sosiologi Agama* Vol. 12, No. 1 (2018): 133.

Beberapa penelitian yang dimaksud antara lain artikel berjudul *Tinjauan Etis Kristen terhadap Politisasi Agama di Indonesia* karya Kurnia Sondang Lumban Gaol. Dalam artikelnya, Gaol mengaitkan fenomena politisasi agama dengan persoalan etika Kristen, khususnya dalam kaitannya dengan moralitas publik dan tanggung jawab orang percaya dalam kehidupan sosial-politik. Menurut Gaol, penggunaan agama sebagai alat pencapaian kekuasaan politik dapat merusak demokrasi dan moral publik.¹¹ Kajian Gaol menyoroti sisi etika dan tanggung jawab moral umat Kristen dalam menolak penyalahgunaan agama untuk kepentingan politik, tetapi belum menyentuh akar terdalam berupa hasrat manusia dan realitas dosa yang membuat orang memakai agama sebagai alat untuk mengejar dan mempertahankan kekuasaan.

Penelitian lain dapat ditemukan dalam artikel berjudul *Politisasi Agama Pilkada Ditinjau dari Perspektif Agama Kristen* yang ditulis oleh Minerva Gabriela. Dalam tulisannya, Gabriela mengaitkan fenomena politisasi agama dengan konsep keadilan dan kesejahteraan dalam perspektif iman Kristen. Ia menegaskan bahwa “keadilan dalam Alkitab disebutkan sebanyak 190 kali, menggambarkan betapa pentingnya keadilan di mata Tuhan. Orang percaya tetap harus berpegang pada keadilan meskipun sering kali menjadi korban ketidakadilan.”¹² Berdasarkan pandangan tersebut, Gabriela menilai bahwa politisasi agama dalam Pilkada DKI

11. Kurnia Sondang Lumban Gaol, "Tinjauan Etis Kristen Terhadap Politisasi Agama di Indonesia," *Missio Ecclesiae* (2016): 14.

12. Minerva Gabriela, "Politisasi Agama Pilkada ditinjau dari Perspektif Agama Kristen," *The Way: Jurnal Teologi dan Kependidikan* 7-No. 2 (Oktober 2021): 105.

Jakarta tahun 2017 mencerminkan terjadinya ketidakadilan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) maupun terhadap umat Kristen secara umum.

Namun demikian, Gabriela menekankan bahwa orang percaya tidak boleh membalas ketidakadilan yang dialaminya, melainkan tetap memegang teguh nilai-nilai keadilan sebagaimana dikehendaki oleh Allah.¹³ Solusi yang diajukan oleh Gabriela untuk mengatasi politisasi agama adalah dengan mengupayakan agar kekuatan agama yang murni yakni agama yang berorientasi pada nilai-nilai kebaikan dan moralitas tanpa intervensi pihak-pihak yang berorientasi pada kekuasaan, dapat mendominasi dalam proses politik.¹⁴ Kajian Gabriela masih berada pada level etis-normatif sehingga belum menyentuh akar terdalam berupa hubungan antara agama, kekuasaan, dan dosa serta hasrat manusia yang bisa mendorong penyalahgunaan agama demi meraih kekuasaan.

Baik penelitian Gaol maupun Gabriela memberikan kontribusi penting dalam menyoroti tanggung jawab moral umat Kristen terhadap fenomena politisasi agama di Indonesia. Namun, keduanya belum menggali dimensi teologis yang lebih mendasar, yakni hakikat kekuasaan dan dosa sebagai sumber dorongan manusia untuk mendominasi. Dalam kekosongan analisis tersebut, teologi politik Kristen, khususnya konsep *libido dominandi* dalam pemikiran Agustinus, menawarkan perspektif yang lebih dalam untuk memahami akar spiritual dari hasrat manusia terhadap kekuasaan.

13. Gabriela, "Politisasi Agama Pilkada ditinjau dari Perspektif Agama Kristen," 105.

14. Gabriela, "Politisasi Agama Pilkada ditinjau dari Perspektif Agama Kristen," 106.

Teologi politik Agustinus bersifat derivatif, yaitu dibangun di atas kerangka teologi luas yang mencakup pemahamannya tentang manusia, dosa, gereja, dan sejarah keselamatan. Oleh sebab itu, konsep *libido dominandi* dalam teologi politik Agustinus tidak dapat dipahami secara terlepas, melainkan merupakan ekspresi dari keseluruhan pandangan teologisnya tentang kondisi manusia yang telah jatuh dan kecenderungan hati yang mencari kuasa untuk kepuasan diri. Dalam penelitian ini, penggunaan konsep *libido dominandi* dalam teologi politik Agustinus didasarkan pada kesesuaian analitis antara konteks yang Agustinus kritisi dan fenomena politisasi agama di Indonesia masa kini.

Penyalahgunaan agama sebagai instrumen legitimasi kekuasaan dalam Kekaisaran Romawi menunjukkan pola yang sebanding dengan praktik politisasi agama di Indonesia kontemporer secara khusus dalam politik elektoral. Dengan demikian, pemikiran Agustinus memberikan lensa teologis yang relevan untuk menilai bagaimana dorongan mengejar kuasa dapat membungkus diri dalam agama, baik pada masa Romawi maupun dalam dinamika politik modern Indonesia.

Sedikit penulis jelaskan mengenai konsep *libido dominandi* dalam teologi politik Agustinus. Munculnya konsep *libido dominandi* dalam teologi politik Agustinus terkait erat dengan kritiknya terhadap Roma yang memanfaatkan agama pagan untuk mempertahankan kekuasaan dan menutupi kekerasan politiknya. Dalam *De Civitate Dei*, Agustinus membongkar manipulasi agama pagan oleh elit politik sebagai instrumen legitimasi kuasa.

Ia menegaskan bahwa negara pagan bukanlah ekspresi dari keadilan, tetapi merupakan produk dari dorongan dosa yang paling dasar dalam diri manusia yang telah jatuh. Manusia yang jatuh menurut Agustinus, dikuasai oleh apa yang ia sebut *libido dominandi*, nafsu untuk mendominasi orang lain dan negara (pagan) merupakan ekspresi dari dorongan-dorongan busuk ini, ia lahir dari nafsu akan kuasa dan kekerasan.¹⁵ Nafsu untuk mendominasi inilah yang Agustinus lihat ada didalam diri pemimpin-pemimpin politik Roma. Para pemimpin ini memanfaatkan agama Romawi yaitu dewa-dewa Roma untuk dilegitimasi menjadi senjata untuk menaklukkan bangsa lain. David Vincent Meconi menilai bahwa inilah yang dikritik oleh Agustinus. Meconi menuliskan bahwa Agustinus memisahkan paganisme dari gambaran romantis tentang Roma dan menunjukkan bahwa keberhasilan imperium bukan hasil restu para dewa, melainkan rekayasa politik yang menutup-nutupi kejahatan dan penaklukan.¹⁶ Agustinus menilai pemimpin politik Roma melakukan rekayasa politik dengan menggunakan agama Roma.

Strategi politis Roma dalam memanfaatkan agama tidak berjalan secara acak, melainkan melalui rangkaian ritual dan tradisi bersama yang disusun untuk menopang kekuasaan. Hal ini ditegaskan oleh Pung Ryong Kim yang menulis bahwa menurut Agustinus, agama Romawi konvensional dan ritual-ritualnya memberikan angin segar bagi bangsa Romawi dengan membenarkan nafsu kekaisaran mereka

15. Augustine, *The City of God against the Pagans*, terj. Robert W. Dyson, Cambridge texts in the history of political thought, 1. publ., 7. printing. (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2007), xviii.

16. David Vincent Meconi, ed., *The Cambridge Companion to Augustine's City of God*, Cambridge Companions to Religion (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), 9.

untuk menaklukkan dan mendominasi.¹⁷ Agustinus menilai bahwa ritual menjadi kesukaan bangsa Roma karena berhubungan dengan dewa-dewa mereka, namun disisi yang lain, dibalik ritual-ritual itu ada kaisar yang memiliki nafsu dominasi yang menggerakkan semuanya.

Lebih dalam lagi, Agustinus juga menunjukkan bahwa ritual-ritual agama pagan Roma, dikelola secara sengaja oleh para elit politik untuk kekuasaan. Agustinus menuliskan bahwa bangsawan dan orang bijak Romawi menjadikan penipuan rakyat dalam urusan agama sebagai pekerjaan mereka.¹⁸ Dengan demikian, agama pagan dalam pandangan Agustinus bukan sekadar ekspresi spiritualitas publik, tetapi instrumen politis yang direkayasa untuk membenarkan dan melanggengkan dorongan imperialis Roma dalam sejarah.

Agustinus menggarisbawahi bahwa “nafsu untuk menguasai ini mengganggu dan menggerogoti umat manusia dengan berbagai keburukan besar. Roma ditaklukkan oleh nafsu ini ketika ia menang atas Alba; dan, dalam memuji kejahatannya sendiri, ia menyebutnya kemuliaan.”¹⁹ Di sini menjadi jelas bahwa apa yang disebut sebagai kejayaan politik Roma pada hakikatnya bukan buah keadilan, melainkan kriminalitas yang dinormalisasi melalui wacana religius dan diberi nama kemuliaan.

Atas dasar inilah, Agustinus menyimpulkan bahwa kerajaan-kerajaan pagan tidak lain hanyalah gerombolan perampok yang diperbesar, dibangun bukan atas

17. Pung Ryong Kim, *Augustine's Apocalyptic Political Theology in the Evil Saeculum*, 1st ed. (Blue Ridge Summit: Lexington Books/Fortress Academic, 2024), 116.

18. Kim, *Augustine's Apocalyptic Political Theology in the Evil Saeculum*, 120.

19. Kim, *Augustine's Apocalyptic Political Theology in the Evil Saeculum*, 119.

keadilan, tetapi atas kerakusan dan nafsu untuk mendominasi.²⁰ Dalam perspektif Agustinus, apa yang disebut *Pax Romana* hanyalah stabilitas yang lahir dari ketakutan, kekuatan militer, dan religiositas yang dikendalikan oleh kekuasaan yaitu sebuah kedamaian semu yang pada hakikatnya merupakan wajah religius dari *libido dominandi*.

Dengan demikian, jelas bahwa *libido dominandi* dalam *De Civitate Dei* berkaitan langsung dengan praktik politisasi agama pagan di Roma, di mana agama dijadikan instrumen untuk menutupi dan melanggengkan dominasi politik. Pada titik ini, perlu ditelusuri lebih jauh bagaimana Agustinus memahami *libido dominandi* sebagai akar teologis dari dorongan manusia untuk menggunakan agama demi kekuasaan. Konsep *libido dominandi* Agustinus menjadi kunci untuk memahami kecenderungan destruktif dalam dinamika kekuasaan.

Menurut Agustinus, manusia pada awalnya diciptakan untuk berkuasa hanya atas makhluk irasional, bukan atas sesamanya, namun setelah kejatuhan, manusia dikuasai oleh *libido dominandi* yang menolak kesetaraan hakiki antar manusia.²¹ *Libido dominandi* terjadi karena manusia berdosa cinta kepada diri (*amor sui*) bukan cinta kepada Allah (*amor Dei*). Arah cinta inilah yang menentukan bagaimana Masyarakat bisa mengalami keadilan yang sejati atau tidak. John Milbank menegaskan hal ini dengan menuliskan bahwa arah keinginan dalam diri manusia

20. *The City of God against the Pagans*, xxiv.

21. *The City of God against the Pagans*, xviii.

adalah faktor kunci untuk menentukan apakah suatu masyarakat akan benar-benar bisa adil dan bersatu.²²

Jika manusia dikuasai cinta diri (*amor sui*), maka *libido dominandi* akan menguasai semua area kehidupan manusia. Nafsu berkuasa mendistorsi kepribadian manusia, perkawinan, keluarga, dan semua hubungan sosial manusia lainnya, termasuk kehidupan bermasyarakat dan keanggotaan.²³ Kekuasaan yang semestinya menjadi sarana kebaikan bersama berubah menjadi instrumen peneguhan diri atau kelompok.

Dalam tatanan yang telah jatuh, yang dikuasai *libido dominandi*, ikatan antarmanusia ditentukan oleh keinginan mereka untuk mengamankan ketergantungan orang lain, untuk memegang kekuasaan atas mereka.²⁴ Dengan demikian, bagi Agustinus inti persoalan politik tidak terletak pada institusi, tetapi pada kondisi hati manusia yang terjerat hasrat untuk menguasai.

Agustinus melihat kecenderungan tersebut bukan sekadar fenomena politik, tetapi cerminan dari hati manusia yang telah jatuh. R. A. Markus menegaskan bahwa menurut Agustinus *Libido dominandi* berakar pada sifat manusia yang telah jatuh dalam dosa.²⁵ *Libido Dominandi* lahir dari cinta diri dan menyimpang, di mana cinta ini tidak memiliki tempat di hati orang benar yang hidup oleh iman.²⁶ *Libido*

22. John Milbank, *Theology and Social Theory: Beyond Secular Reason*, 2. ed., [Nachdr.]. (Oxford, UK: Blackwell, 2011), 404.

23. Peter Scott dan William T. Cavanaugh, *The Blackwell Companion to Political Theology*, Blackwell companions to religion (Oxford: Blackwell, 2004), 53.

24. R. A. Markus, *Saeculum: history and society in the theology of St. Augustine*, Rev. ed. (Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 1988), xvi.

25. Markus, *Saeculum*, xvi.

26. Markus, *Saeculum*, 120.

dominandi merupakan ciri dari manusia berdosa yang cinta akan dirinya dan mengabaikan Allah.

Agustinus menilai bahwa *libido dominandi* adalah bentuk cinta diri yang berlebihan atau kesombongan.²⁷ Orang berdosa yang dikuasai cinta diri dan *libido dominandi* dalam pemikiran Agustinus adalah orang yang masuk dalam *civitas terrena* yaitu kota duniawi. John Milbank menegaskan hal ini dengan menuliskan bahwa *civitas terrena* ditandai oleh dosa, yang bagi Agustinus berarti penolakan terhadap Tuhan dan sesama demi cinta diri dan penegasan diri; kenikmatan atas kekuasaan yang sewenang-wenang, dan karenanya penuh kekerasan atas sesama.²⁸

Berbicara mengenai hasrat manusia yang terdistorsi akibat dosa, Thomas Aquinas juga memberikan kategori mengenai hal ini, yakni *concupiscence*. Dalam *Summa Theologiae*, Aquinas mendefinisikan *concupiscence* sebagai kerinduan akan kebaikan yang menyenangkan, yaitu dorongan sensitif manusia terhadap objek-objek yang memberi kenikmatan.²⁹ Eberl menjelaskan bahwa Aquinas membedakan *concupiscence* ke dalam dua jenis, pertama hasrat alami manusia dan hewan terhadap hal-hal yang menyenangkan sesuai kodratnya. Kemudian yang kedua, hasrat atas sesuatu yang secara rasional dipersepsi sebagai baik tetapi berada di luar batas yang cocok menurut kodrat hewani. Eberl merangkum perbedaan ini dengan menuliskan, "Thomas membedakan *concupiscence* dalam dua hal. Pertama hasrat alami manusia dan hewan lainnya terhadap hal-hal yang menyenangkan.

27. Meconi, *The Cambridge Companion to Augustine's City of God*, 91.

28. Milbank, *Theology and Social Theory*, 392.

29. Jason T. Eberl, *The Routledge Guidebook to Aquinas' Summa Theologiae*, Routledge guides to the great books (New York: Routledge, 2016), 129.

Kedua, hasrat akan sesuatu yang secara rasional dianggap baik bagi seseorang di luar apa yang 'cocok' menurut kodrat hewani seseorang."³⁰

Dua kategori ini menunjukkan bahwa distorsi terjadi terutama pada hasrat yang tidak alami, yaitu ketika hasrat bergerak melampaui keteraturan yang semestinya dan menjadi *inordinate desire*. *Inordinate desire* bukan hanya kesenangan jasmani, tetapi terutama apa yang ia sebut sebagai *spiritual sins*, yakni hasrat akan kehormatan, superioritas, dan penguasaan atas orang lain. Aquinas membedakan dosa jasmani dari dosa spiritual dan menegaskan bahwa dosa rohani yang bertujuan untuk mendapatkan kesenangan seperti pujian dari orang lain lebih berat karena berurusan dengan kebaikan duniawi yang bersifat intelektual dan menjadi objek cinta yang salah.³¹

Bagi Aquinas kejatuhan hasrat manusia tidak hanya berupa dorongan kenikmatan atas hal-hal duniawi, namun juga termasuk kekuasaan, sejauh kekuasaan itu dikehendaki sebagai objek cinta yang salah dan tidak diarahkan pada kebaikan yang tertib pada Allah. Meskipun demikian, pemikiran Aquinas tetap bergerak dalam ranah etika pribadi. Fokus konsep hasrat pada Aquinas adalah pada psikologi moral individu, yaitu bagaimana keinginan dalam diri bekerja, tertib atau tidak tertib, dan bagaimana akal menata atau gagal menatanya. Ia memahami kejatuhan manusia sebagai kekacauan hasrat di dalam diri, bukan sebagai dasar terbentuknya tatanan politik yang mewujudkan dosa secara struktural. Aquinas tidak menjelaskan bagaimana keinginan yang tidak tertib itu berubah menjadi

30. Eberl, *The Routledge Guidebook to Aquinas' Summa Theologiae*, 132.

31. Eberl, *The Routledge Guidebook to Aquinas' Summa Theologiae*, 170.

sistem dominasi dalam sejarah, atau bagaimana agama dipakai untuk menopang kekuasaan.

Di titik inilah Agustinus bergerak lebih jauh dan konsep *libido dominandi* Agustinus lebih tepat dipakai dibandingkan konsep *inordinate desire* Aquinas atau konsep-konsep lainnya. *Libido dominandi* tidak hanya mendeskripsikan hasrat jatuh, tetapi menunjukkan bagaimana hasrat itu menjadi politis, memasuki sejarah sebagai kekuasaan yang menundukkan sesama melalui instrumen religius. Dengan demikian, *libido dominandi* memberikan landasan teologis yang kuat untuk membaca politisasi agama di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *libido dominandi* dalam teologi politik Agustinus menjelaskan dorongan manusia untuk memanipulasi agama demi kekuasaan?
2. Bagaimana konsep tersebut dapat digunakan untuk menganalisis fenomena politisasi agama dalam konteks politik Indonesia, secara khusus dalam politik elektoral pasca Reformasi?
3. Bagaimana peran gereja dalam mencegah *libido dominandi* terjadi dalam politik elektoral, serta bagaimana gereja mengatasi politisasi agama yang sedang terjadi dalam politik elektoral?

Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguraikan secara sistematis konsep *libido dominandi* dalam teologi politik Agustinus, khususnya melalui karyanya *De Civitate Dei*.
2. Menganalisis fenomena politisasi agama dalam politik elektoral di Indonesia pasca Reformasi dengan menggunakan konsep *libido dominandi* dalam teologi politik Agustinus sebagai kerangka analitis.
3. Merumuskan respons gereja dalam mengatasi dan mencegah kecenderungan *libido dominandi* dalam praktik politik elektoral.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berkontribusi bagi pengembangan studi teologi politik, khususnya dalam memperkaya diskursus tentang relasi agama dan kekuasaan dari perspektif Agustinus serta membuka dialog dengan ilmu sosial-politik dalam membaca politisasi agama dalam politik elektoral di Indonesia pasca Reformasi. Penelitian ini juga menawarkan kerangka analisis melalui konsep *libido dominandi* untuk memahami akar teologis hasrat manusia atas kekuasaan. Secara praktis, penelitian ini menolong komunitas Kristen untuk lebih kritis terhadap instrumentalitas agama dalam politik dan menegaskan kembali bahwa kekuasaan sejati berakar pada pelayanan.

Pembatasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada kajian teologis mengenai fenomena politisasi agama dalam konteks politik elektoral di Indonesia pasca Reformasi. Secara khusus, penelitian ini tidak mencakup seluruh peristiwa pemilihan kepala daerah (pilkada) pasca Reformasi, melainkan hanya mengambil beberapa contoh kasus yang representatif untuk mengidentifikasi pola dan indikator politisasi agama dalam praktik politik elektoral. Analisis dalam penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran Agustinus dari Hippo, khususnya konsep *libido dominandi*, sebagai lensa teologi politik untuk memahami relasi antara agama dan kekuasaan.

Namun demikian, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menilai atau menghakimi motivasi batin para aktor politik tertentu, mengingat bahwa motivasi hati manusia tidak bisa diamati atau dibuktikan secara langsung melalui metode ilmiah atau pengamatan luar, dan pada akhirnya hanya diketahui sepenuhnya oleh aktor politik sendiri. Oleh karena itu, fokus analisis dibatasi pada pembacaan terhadap pola, fungsi, dan dampak penggunaan agama dalam relasi kuasa, dengan menggunakan indikator-indikator teologis yang ditarik dari kritik Agustinus terhadap penyatuan agama dan kekuasaan di Roma.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi literatur terhadap berbagai sumber yang relevan, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini adalah karya-karya Agustinus, khususnya *De Civitate*

Dei, serta tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan konsep *libido dominandi*.

Sumber-sumber ini digunakan untuk mengkonstruksi kerangka teologis mengenai relasi antara dosa, hasrat berkuasa, dan kehidupan politik.

Sementara itu, sumber sekunder mencakup literatur akademik yang membahas pemikiran politik Agustinus, teologi politik Kristen, serta kajian kontemporer mengenai fenomena politisasi agama di Indonesia. Literatur sekunder ini berfungsi untuk memperkaya analisis, memberikan perspektif kritis, serta menghubungkan pemikiran Agustinus dengan konteks sosial-politik yang lebih luas.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengintegrasikan analisis teologis klasik dengan pembacaan kontekstual terhadap realitas politik kontemporer, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena politisasi agama.

Sistematika Penulisan

Bab satu berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bagian ini memberikan landasan awal untuk memahami konteks dan arah penelitian.

Bab dua membahas *libido dominandi* dalam politik Roma. Dalam bagian ini, pembahasan difokuskan pada konsep *libido dominandi* dalam teologi politik Agustinus, serta bagaimana Agustinus melihat keberadaan *libido dominandi* dalam

politik Roma melalui tindakan-tindakan politik yang dilakukan oleh Roma maupun melalui indikator-indikator tertentu yang muncul dalam praktik politik Romawi.

Bab tiga membahas politisasi agama dalam politik elektoral di Indonesia pasca Reformasi. Pembahasan dalam bab ini bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana karakter politik elektoral yang adil dan tidak adil dalam konteks demokrasi Indonesia pasca Reformasi. Selain itu, bab ini juga memperlihatkan bahwa dalam praktik politik elektoral yang tidak adil terdapat penggunaan politik identitas yang dapat berkembang menjadi politisasi agama. Selanjutnya, penulis akan menunjukkan bagaimana politisasi agama tersebut tampak secara konkret dalam praktik pemilu, khususnya dalam dua kasus pilkada yang menjadi fokus pembahasan penelitian ini.

Bab empat membahas konsep *libido dominandi* Agustinus dalam membaca fenomena politisasi agama dalam politik elektoral di Indonesia pasca Reformasi. Dalam bab ini dipahami bahwa pola-pola politisasi agama dalam politik elektoral di Indonesia pasca Reformasi dapat dibaca sebagai hasrat manusia untuk mendominasi dan sebagai bentuk penyimpangan peran spiritual agama dalam ruang publik. Bab ini juga menguraikan peran gereja dalam merespons fenomena politisasi agama dalam politik elektoral di Indonesia. Fokus pembahasan terletak pada bagaimana gereja membentuk umat yang mengasihi Allah (*amor Dei*), serta bagaimana gereja berkontribusi dalam mencegah politisasi agama melalui upaya mengusahakan kebaikan bersama (*common good*).

Bab lima memuat kesimpulan penelitian yang merangkum temuan-temuan utama, serta memberikan saran yang dapat diajukan bagi gereja, masyarakat, dan penelitian selanjutnya.

BAB LIMA

KESIMPULAN

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena politisasi agama di Indonesia pasca Reformasi tidak dapat dipahami secara dangkal hanya sebagai dinamika sosial-politik semata, melainkan memiliki akar teologis-antropologis yang lebih mendalam. Di balik fenomena tersebut dapat dibaca adanya *libido dominandi*, yaitu hasrat untuk berkuasa, yang menggerakkan manusia untuk memanfaatkan agama sebagai alat politik demi mencapai kepentingan kekuasaan.

Konsep *libido dominandi* ini berakar dalam pemikiran Agustinus, yang melihatnya sebagai konsekuensi dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kejatuhan tersebut mengakibatkan perubahan orientasi manusia, dari yang semula terarah kepada Allah (*amor Dei*) menjadi terarah kepada diri sendiri (*amor sui*). Dalam kondisi ini, manusia tidak lagi hidup dalam relasi yang setara, melainkan terdorong untuk meninggikan diri dan merendahkan sesama melalui dominasi dan kekuasaan.

Dalam kerangka teologi politik Agustinus, *libido dominandi* menjadi kekuatan yang mendorong manusia untuk menguasai dan mendominasi sesamanya. Hal ini tampak secara konkret dalam analisis Agustinus terhadap Kekaisaran Romawi dalam karyanya *De Civitate Dei*. Agustinus mengkritik praktik politik sakral di Roma, di mana agama pagan digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan.

Dalam konteks tersebut, ekspansi kekaisaran sering kali dibungkus dengan klaim religius, seolah-olah merupakan kehendak para dewa. Namun, interpretasi terhadap kehendak ilahi tersebut pada kenyataannya berada di bawah kontrol elit politik. Dengan demikian, agama tidak berfungsi sebagai koreksi terhadap kekuasaan, melainkan sebagai instrumen untuk memperluas dan mempertahankan dominasi.

Dari analisis ini, dapat diidentifikasi beberapa indikator politisasi agama. Pertama, penggunaan agama sebagai legitimasi kekuasaan. Kedua, penggunaan agama untuk menormalisasi ketidakadilan, seperti penjarahan dan penindasan dalam ekspansi politik. Ketiga, penggunaan agama sebagai alat untuk membungkam kritik terhadap penguasa. Ketiga indikator ini menunjukkan bagaimana *libido dominandi* bekerja melalui instrumentalitas agama.

Menariknya, indikator-indikator tersebut juga ditemukan dalam konteks politik elektoral di Indonesia pasca Reformasi. Agama kerap digunakan untuk mengarahkan pilihan politik terhadap kandidat tertentu, menciptakan ketidakadilan dalam proses demokrasi, serta membungkam kritik melalui pelabelan negatif terhadap pihak yang berbeda pandangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa politisasi agama di Indonesia dapat dibaca sebagai manifestasi kontemporer dari *libido dominandi*.

Dampak dari fenomena ini sangat signifikan, yaitu munculnya polarisasi sosial dan degradasi kualitas demokrasi. Masyarakat menjadi terpecah, dan demokrasi kehilangan peran pentingnya. Dalam konteks ini, *libido dominandi* tidak

hanya menjadi persoalan teologis, tetapi juga ancaman nyata bagi kehidupan bersama dalam masyarakat demokratis.

Berangkat dari permasalahan tersebut, pertanyaan penting yang muncul adalah, bagaimana peran gereja dalam merespons kecenderungan *libido dominandi* dalam politik elektoral? Bagaimana gereja dapat mencegah politisasi agama? Dalam hal ini, pemikiran James K. A. Smith menawarkan kerangka yang konstruktif. Smith menekankan bahwa transformasi manusia tidak terutama terjadi melalui transfer pengetahuan, melainkan melalui pembentukan hasrat. Oleh karena itu, gereja dipanggil untuk mengarahkan kembali cinta manusia dari *amor sui* menuju *amor Dei*.

Smith menunjukkan bahwa dunia membentuk hasrat manusia melalui liturgi sekuler, yaitu praktik-praktik yang diulang secara terus-menerus dan secara tidak sadar membentuk imajinasi tentang kehidupan yang baik menurut nilai-nilai dunia. Sebagai respons, gereja juga harus secara sadar membentuk hasrat jemaat melalui liturgi Kristen, khususnya dalam ibadah.

Ibadah, dengan pengulangan unsur-unsurnya, berfungsi sebagai sarana pembentukan imajinasi Kerajaan Allah. Melalui praktik-praktik seperti pengakuan dosa, pujian, doa, pemberitaan firman, dan sakramen, jemaat dibentuk untuk melihat realitas dari perspektif Kerajaan Allah. Proses ini pada akhirnya membentuk orientasi cinta manusia, sehingga mereka tidak lagi terdorong oleh *libido dominandi*.

Ketika orang percaya telah dibentuk dalam *amor Dei*, mereka akan terlibat dalam politik secara berbeda. Mereka tidak akan menggunakan agama sebagai alat

untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan, melainkan akan berpartisipasi dalam politik dengan menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan bersama (*common good*).

Dalam konteks politik elektoral, hal ini berarti bahwa baik sebagai kandidat maupun sebagai pemilih, orang Kristen akan bertindak berdasarkan pertimbangan rasional dan etis, seperti program kerja, rekam jejak, serta integritas kandidat, bukan berdasarkan mobilisasi identitas agama.

Selain itu, orang percaya juga dipanggil untuk berkontribusi secara aktif dalam kehidupan publik demi mencegah politisasi agama. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan mengupayakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan bersama. Gereja dapat mengambil peran melalui berbagai praktik konkret, seperti membangun relasi lintas iman, mengembangkan kerja sama sosial antar komunitas, serta mendorong penegakan hukum yang adil, khususnya dalam membatasi penggunaan isu SARA dalam kampanye politik.

Lebih lanjut, gereja juga dapat memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi publik untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan kebersamaan. Dengan demikian, gereja tidak hanya berperan dalam pembentukan internal jemaat, tetapi juga dalam transformasi sosial yang lebih luas.

Pada akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa persoalan politisasi agama tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan struktural atau regulatif, melainkan membutuhkan transformasi mendalam pada tingkat hati dan hasrat manusia. Dalam hal ini, gereja memiliki peran yang sangat strategis melalui liturgi

sebagai sarana pembentukan manusia baru yang hidup dalam kasih kepada Allah dan sesama, serta terbebas dari kecenderungan *libido dominandi*.

BIBLIOGRAFI

- Agus Suparno, Basuki. *Reformasi dan Jatuhnya Soeharto*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2012.
- Aman. *Sejarah Indonesia masa kemerdekaan, 1945-1998*. Diedit oleh Kartika N. Nugrahini. Yogyakarta: Penerbit Ombak, t.t.
- Aristotle, dan C. D. C. Reeve. *Politics: A New Translation*. The New Hackett Aristotle. Cambridge: Hackett Publishing Company, Inc, 2017.
- Augustin, dan R. P. H. Green. *Augustine De Doctrina Christiana*. Oxford early christian texts. Oxford: Clarendon press, 1995.
- Augustine. *The City of God against the Pagans*. Diterjemahkan oleh Robert W. Dyson. Cambridge texts in the history of political thought. 1. publ., 7. printing. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2007.
- Augustinus, Aurelius, John Arthur Maurant, dan William J. Collinge. *Four Anti-Pelagian Writings*. The Fathers of the church no. v. 86. Washington, D.C: Catholic University of America Press, 2010.
- Beard, Mary, John A. North, dan S. R. F. Price. "Religions of Rome. 2: A Sourcebook." 22nd printing. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2021.
- Casanova, José. *Public Religions in the Modern World*. 6. [reprint]. Chicago: University of Chicago Press, 2008.
- Dahl, Robert Alan, dan Ian Shapiro. *On Democracy*. A Veritas paperback. [Second edition], Veritas paperback edition. New Haven, CT: Yale University Press, 2021.
- Darmaputera, Eka. *Teologi publik: teks-teks terpilih*. Diedit oleh Trisno S. Sutanto. Cetakan ke-1. Jakarta: Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) : BPK Gunung Mulia, 2022.
- Dougherty, Richard J. *Augustine's Political Thought*. Rochester studies in medieval political thought. Rochester (N.Y.): University of Rochester Press, 2019.

- Dyson, Robert W. *St Augustine of Hippo: The Christian Transformation of Political Philosophy*. Continuum studies in philosophy. Repr. London: Continuum, 2007.
- Eberl, Jason T. *The Routledge Guidebook to Aquinas' Summa Theologiae*. Routledge guides to the great books. New York: Routledge, 2016.
- Effendi, Muhamad Ridwan, dan Iqbal Syafrudin. "Pertanian Agama pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017" 19, no. 2 (2020).
- Elshtain, Jean Bethke. *Augustine and the Limits of Politics*. Catholic ideas for a secular world. 2018 edition. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 2018.
- Fealy, Greg, dan Ronit Ricci. *Contentious Belonging: The Place of Minorities in Indonesia*. Indonesia update series. Singapore: ISEAS publishing, 2019.
- Feith, Herbert. *The Indonesian Elections of 1955*. Ithaca, NY: Cornell University, Modern Indonesia Project, 1957.
- Fox, Jonathan. *An Introduction to Religion and Politics: Theory and Practice*. Routledge Studies in Religion and Politics. London and New York: Routledge, 2013.
- Fredriksen, Paula. *Augustine and the Jews: A Christian Defense of Jews and Judaism*. New Haven: Yale University Press, 2014.
- Gabriela, Minerva. "Politisasi Agama Pilkada ditinjau dari Perspektif Agama Kristen." *The Way: Jurnal Teologi dan Kependidikan* 7-No. 2 (Oktober 2021): 95-109.
- Gaol, Kurnia Sondang Lumban. "Tinjauan Etis Kristen Terhadap Politisasi Agama di Indonesia." *Missio Ecclesiae* (2016).
- Haidt, Jonathan. *The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion*. New York: Pantheon Books, 2012.
- Hakim, Luqman Nul. *Islamism and the Quest for Hegemony in Indonesia*. Contestations in contemporary Southeast Asia series. Singapore: Palgrave Macmillan, 2023.
- Harrop, Martin, dan William L. Miller. *Elections and Voters: A Comparative Introduction*. Repr. Basingstoke: Macmillan Education, 1993.
- Hopkins, Keith. *Sociological Studies in Roman History*. Diedit oleh Christopher Kelly. Cambridge classical studies. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2018.

- Ihsan, A. Bakir, dan Cucu Nurhayati. *Agama, Negara, dan Masyarakat: Tokoh Agama di Tengah Politik Identitas Warga Kota*. Cetakan pertama. Jakarta: Penerbit HAJA Mandiri, 2020.
- Intan, Benyamin Fleming. *"Public religion" and the Pancasila-based state of Indonesia: an ethical and sociological analysis*. American university studies no. v. 238. New York: Peter Lang, 2006.
- Katz, Richard S. *A Theory of Parties and Electoral Systems*. Baltimore London: The Johns Hopkins university press, 1980.
- Keller, Timothy. *Center Church: Doing Balanced, Gospel-Centered Ministry in Your City*. Grand Rapids: Zondervan, 2012.
- Kim, Pung Ryong. *Augustine's Apocalyptic Political Theology in the Evil Saeculum*. 1st ed. Blue Ridge Summit: Lexington Books/Fortress Academic, 2024.
- Kurniawan, Budi. "Politisasi Agama di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran di Indonesia dan Ancaman Bagi Demokrasi." *Jurnal Sosiologi Agama* Vol. 12, No. 1 (2018).
- Lestari, Dina. "Pilkada DKI Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas di Indonesia." *Simulacra* 2, no. 1 (Juni 2019).
- Liddle, R. William. "Soeharto's Indonesia: Personal Rule and Political Institutions." *Pacific Affairs* 58, no. 1 (Spring 1985).
- Manese, Rohit Mahatir, dan Budi Nurhamidin. "Relasi Agama dan Politik: Preferensi Politik Pemilih Milenial di Ponosakan Belang dalam Pilkada Sulawesi Utara Tahun 2020." *RI'YAH: Jurnal Sosial dan Keagamaan* Vol. 6, No. 02 (Juli 2021).
- Marion, Jean-Luc, ed. *In the Self's Place: The Approach of Saint Augustine*. Cultural memory in the present. Stanford, Calif: Stanford University Press, 2012.
- Markus, R. A. *Saeculum: history and society in the theology of St. Augustine*. Rev. ed. Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 1988.
- Meconi, David Vincent, ed. *The Cambridge Companion to Augustine's City of God*. Cambridge Companions to Religion. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.
- Milbank, John. *Theology and Social Theory: Beyond Secular Reason*. 2. ed., [Nachdr.]. Oxford, UK: Blackwell, 2011.
- Muhtadi, Burhanuddin. *Populisme, Politik Identitas, dan Dinamika Elektoral: Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural*. Malang: Intrans Publishing, 2019.

- Nelwan, Gerry. "Identity Politics and Inter-Religious Relations: Analysing the 2020 Election in Manado City." *POLITICON : Jurnal Ilmu Politik* Vol.4 No.1 (6 Maret 2022): Hal 1-16.
- O'Donovan, Oliver. *The Problem of Self-Love in St. Augustine*. Eugene: OR: Wipf and Stock Publishers, 2006.
- Ognjenović, Gorana, dan Jasna Jozelić, ed. *Politicization of Religion, the Power of Symbolism: The Case of Former Yugoslavia and Its Successor States*. Palgrave studies in religion, politics, and policy. First edition. New York, NY: palgrave macmillan, 2014.
- Pamungkas, Cahyo, dan Yogi Setya, ed. *Intoleransi dan Politik Identitas Kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2020.
- Price, S. R. F. *Rituals and Power: The Roman Imperial Cult in Asia Minor*. Repr. ed. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1990.
- Rais, Fadli. *Infeksi demokrasi: politisasi SARA dalam pemilu 2019 di Jawa Tengah*. Cetakan pertama. Semarang: Badan Pengawas Pemilihan Umum, Provinsi Jawa Tengah : eLSA Press, 2019.
- Ridwan, dan Musafir Pababbari. "Politisasi Agama dan Politik Identitas." *LITERA Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol. 2, No. 1 (2025).
- Sari, Endang. "Kebangkitan Politik Identitas Islam pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta." *Kritis: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 2, no. 2 (Desember 2016).
- Scott, Peter, dan William T. Cavanaugh. *The Blackwell Companion to Political Theology*. Blackwell companions to religion. Oxford: Blackwell, 2004.
- Smith, James K. A. *Awaiting the King (Cultural Liturgies): Reforming Public Theology*. Cultural Liturgies Ser no. v. 3. Grand Rapids: Baker Academic, 2017.
- . *Desiring the Kingdom (Cultural Liturgies): Worship, Worldview, and Cultural Formation*. Cultural Liturgies Series. 1st ed. Grand Rapids: Baker Academic, 2009.
- . *Imagining the Kingdom (Cultural Liturgies): How Worship Works*. Cultural Liturgies Series. 1st ed. Grand Rapids: Baker Academic, 2013.
- Soper, J. Christopher, dan Joel Steven Fetzer. *Religion and Nationalism in Global Perspective*. Cambridge Studies in Social Theory, Religion and Politics. Cambridge University Press, 2018.

- St Augustine, dan Mark G. Henninger. *The Confessions of Saint Augustine: Contemporary English*. Paraclete Press (MA), 2010.
- Supriyadi et al., Yadi. "Perkembangan Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi 1998 dalam Lingkup Hubungan Warga Negara dengan Negara dalam Perspektif Hukum." *Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 7, no. 2 (Juli 2025).
- Suryadinata, Leo. *Pancasila and the Challenge of Political Islam: Past and Present*. Trends in Southeast Asia no. 2018 no. 14. Singapore: ISEAS–Yusof Ishak Institute, 2019.
- Varhelyi, Zsuzsanna. *The Religion of Senators in the Roman Empire: Power and the Beyond*. New York (N.Y.): Cambridge university press, 2010.
- Widiatmaka, Pipit dkk. "Politik Agama di Indonesia: Politisasi Agama Islam dalam Kontestasi Pemilihan Umum." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* Vol. 24 No. 2 (2024).
- Yosarie, Ikhsan. *Menangani Politisasi SARA: Mendorong Pemajuan Kebebasan Beragama dalam Gelaran Pemilihan Umum*. Diedit oleh Halili. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2019.